

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional menempatkan manusia sebagai prioritas utama, dimana manusia memiliki peran ganda yaitu sebagai penggerak sekaligus penerima manfaat pembangunan. UNDP (1990), mendefinisikan pembangunan manusia sebagai upaya untuk memperluas jangkauan pilihan setiap individu, khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, serta lapangan kerja. Di tengah tantangan global yang kian rumit, aspek ini menjadi kunci bagi daya saing dan ketahanan negara. Saat ini, paradigma kemajuan ekonomi telah bergeser. Indikator keberhasilan suatu pembangunan tidak lagi hanya dilihat dari pertumbuhan *output* semata, melainkan pada kapasitas negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) secara berkelanjutan sebagai dasar utamanya (Zumaeroh et al., 2023).

Sebagai tolak ukur pembangunan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang menilai aspek kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat. Konsep ini mengadopsi pandangan UNDP (1990) yang menegaskan bahwa manusia adalah aset utama bangsa, sehingga fokus pembangunan harus beralih dari sektor mengejar angka ekonomi menjadi upaya meningkatkan kualitas hidup agar masyarakat lebih sehat dan produktif.

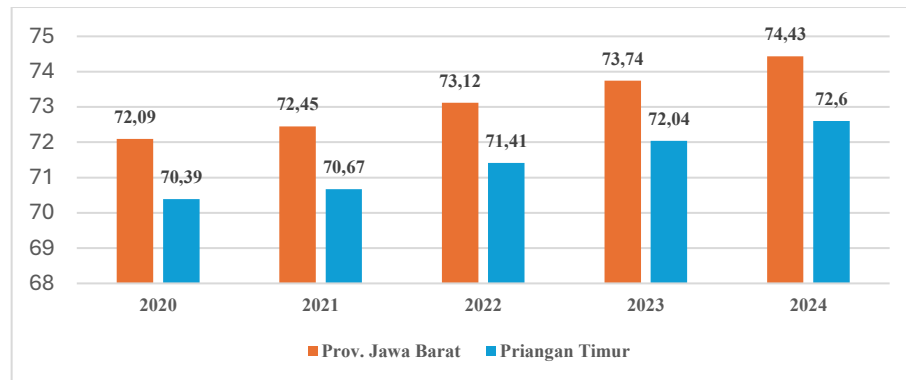
Indeks Pembangunan Manusia berperan strategis dalam memetakan tantangan pembangunan sekaligus menjadi landasan vital bagi perumusan kebijakan pemerintah yang lebih tepat sasaran (Sari & Warsitasari, 2023).

Pemerintah Indonesia menargetkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nasional hingga mencapai kategori sangat tinggi dengan nilai di atas 80 pada tahun 2045, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 (Kementerian PPN/Bappenas, 2019). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Indonesia tahun 2024 mencapai 74,20 persen, naik dari 73,55 persen pada tahun sebelumnya. Meskipun mengalami peningkatan, capaian tersebut masih menunjukkan ketimpangan antarwilayah.

Di balik capaian positif IPM Jawa Barat tahun 2024 sebesar 74,43 persen, tantangan pemerataan pembangunan masih menjadi isu krusial yang belum sepenuhnya teratasi. Perbedaan kualitas hidup yang cukup signifikan antara masyarakat urban dan rural menunjukkan bahwa disparitas wilayah masih menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan. Kawasan Priangan Timur, yang meliputi Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Tasikmalaya (RKPD, 2021), mencerminkan kondisi tersebut. Capaian IPM di wilayah ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata provinsi, sehingga menunjukkan perlunya penguatan upaya pemerataan akses terhadap layanan dasar serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Rendahnya tingkat IPM dan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah mencerminkan belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, baik dari segi ketepatan sasaran maupun efektivitas kebijakan yang dijalankan (Sari & Warsitasari, 2023). Oleh karena itu, diperlukan peran kebijakan pembangunan yang lebih terarah, terutama melalui penguatan sektor-sektor strategis yang

berhubungan langsung dengan pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas hidup penduduk serta memperkecil kesenjangan pembangunan manusia antar wilayah.



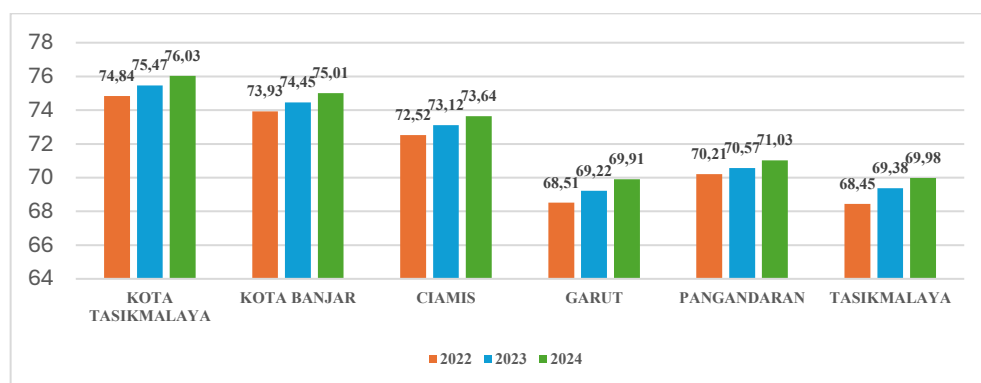
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah (2025)

Gambar 1. 1 Data Perbandingan IPM Provinsi Jawa Barat dengan Priangan Timur Tahun 2020-2024 (Persen)

Berdasarkan gambar 1.1, secara umum IPM Jawa Barat mengalami peningkatan yang konsisten dari 72,09 persen pada tahun 2020 menjadi 74,43 persen pada tahun 2024. Tren positif laju IPM ini dapat dikaitkan dengan keberhasilan intervensi pemerintah melalui berbagai program pembangunan yang berfokus pada perbaikan kualitas pendidikan, derajat kesehatan, serta penguatan ekonomi (RKPD, 2021). Sementara itu, IPM Priangan Timur juga menunjukkan tren peningkatan dalam periode yang sama, meskipun tingkat capaiannya masih berada di bawah rata-rata provinsi. Pada tahun 2020, IPM Priangan Timur tercatat sebesar 70,39 persen dan terus meningkat secara bertahap hingga mencapai 72,60 persen pada tahun 2024, yang menunjukkan adanya perbaikan kondisi pembangunan manusia di wilayah tersebut. Hal ini mencerminkan ketimpangan

akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi akibat perbedaan karakteristik wilayah serta pemerataan infrastruktur.

Berdasarkan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, peningkatan IPM di wilayah Priangan Timur masih menghadapi sejumlah tantangan. Wilayah ini umumnya berada di bawah rata-rata IPM provinsi, yang mencerminkan keterbatasan akses dan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kondisi ekonomi masyarakat. Struktur perekonomian yang masih didominasi oleh sektor primer dan informal, ditambah dengan belum meratanya persebaran investasi dan infrastruktur, berdampak pada rendahnya daya beli masyarakat. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh dampak pandemi COVID-19, sehingga upaya percepatan peningkatan IPM di wilayah Priangan Timur belum berlangsung optimal.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah (2025)

Gambar 1. 2 IPM Priangan Timur Tahun 2022-2024 (Persen)

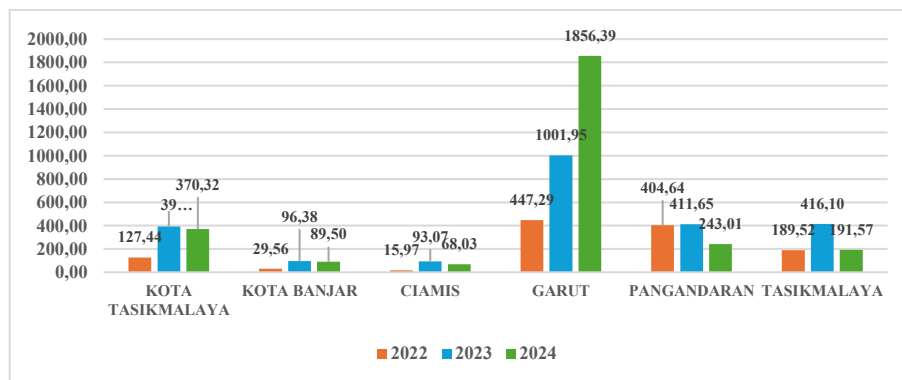
Berdasarkan Gambar 1.2, IPM di Priangan Timur tahun 2020-2024 menunjukkan tren positif, dimana setiap daerah mengalami peningkatan. Dari gambar tersebut terlihat perbedaan perkembangan IPM antara wilayah dengan IPM tinggi dan rendah. Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, dan Kabupaten Ciamis termasuk wilayah dengan capaian IPM tinggi, dengan nilai di atas 71 persen, Kota

Tasikmalaya secara konsisten menempati posisi tertinggi. Hal ini mencerminkan kondisi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang relatif lebih baik di ketiga wilayah tersebut. Sementara itu, Kabupaten Garut, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Tasikmalaya berada dalam kategori IPM rendah dengan nilai antara 67 hingga 70 persen, dan Kabupaten Tasikmalaya menjadi wilayah dengan capaian IPM terendah. Meski demikian, seluruh daerah menunjukkan perbaikan bertahap dalam pembangunan manusia di Priangan Timur.

Pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi IPM penting untuk menilai kualitas pembangunan daerah. Perbedaan capaian IPM antar wilayah mencerminkan ketimpangan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan, sehingga analisis faktor tersebut diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan dan merumuskan strategi yang lebih terarah dan berkelanjutan (Meilinna et al., 2023).

Peningkatan IPM tidak terlepas dari kinerja perekonomian daerah, salah satunya melalui peran investasi. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki fungsi penting dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas produksi, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, PMDN diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pembangunan manusia. Pergerakan sektor-sektor ekonomi produktif dalam suatu daerah dipengaruhi oleh adanya investasi yang masuk sebagai sumber permodalan untuk mendorong kegiatan pembangunan. Investasi tersebut tidak hanya berperan dalam menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga meningkatkan pendapatan dan daya beli

masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (Salsabila & Hasmarini, 2023).



Sumber: Portal Ekosistem Data Jabar, diolah (2025)

Gambar 1. 3 Penanaman Modal Dalam Negeri Priangan Timur

Tahun 2022-2024 (Miliar)

Berdasarkan Gambar 1.3, perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di wilayah Priangan Timur selama periode 2022-2024 menunjukkan pola yang fluktuatif dan belum merata antar daerah. Terdapat daerah yang mencatatkan pertumbuhan investasi secara konsisten, namun ada pula yang mengalami ketidakstabilan bahkan penurunan di tengah periode tersebut. Kota Tasikmalaya meningkat dari 127,44 miliar pada 2022 menjadi 393,85 miliar pada 2023, lalu sedikit menurun menjadi 370,32 miliar pada 2024. Kota Banjar juga naik dari 29,56 miliar menjadi 96,38 miliar, kemudian turun tipis menjadi 89,50 miliar, sementara Ciamis meningkat dari 15,97 miliar ke 93,07 miliar dan turun kembali menjadi 68,03 miliar. Kabupaten Garut mencatat lonjakan paling signifikan, dari 447,29 miliar pada 2022 menjadi 1001,95 miliar pada 2023 dan terus meningkat hingga 1856,39 miliar pada 2024. Sebaliknya, Pangandaran mengalami penurunan dari 411,65 miliar pada 2023 menjadi 243,01 miliar pada 2024, dan Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan dari 416,10 miliar pada 2023 menjadi 191,57 miliar pada 2024.

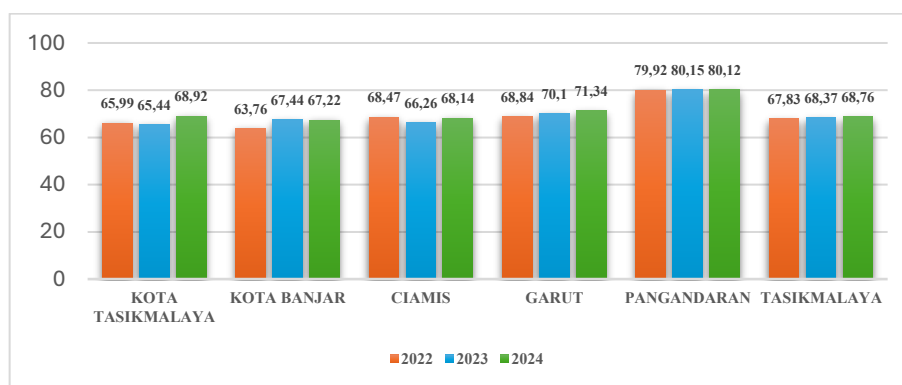
Tasikmalaya naik dari 189,52 miliar ke 416,10 miliar lalu turun kembali menjadi 191,57 miliar. Secara keseluruhan, PMDN menunjukkan kecenderungan meningkat namun belum stabil dan masih terpusat pada wilayah tertentu, mencerminkan perbedaan daya tarik investasi serta sensitivitas terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan regional.

Dalam proses pembangunan, pembentukan modal memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan, baik pembangunan ekonomi maupun pembangunan manusianya. Pembangunan memerlukan ketersediaan modal dalam jumlah yang besar, sehingga salah satu upaya yang ditempuh adalah mendorong penanaman modal, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri (Subandi, 2014).

Selain PMDN, tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan salah satu indikator kesejahteraan yang digunakan dalam mengukur pembangunan manusia (Faelassuffa & Yuliani, 2021). Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja akan berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi, yang memicu bertambahnya peluang kerja serta meningkatkan permintaan tenaga kerja, sehingga pada akhirnya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (Halawa & Manalu, 2024). Sektor unggulan di Priangan Timur meliputi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pengadaan air; serta sektor pertambangan dan penggalian yang berperan penting karena kontribusinya terhadap pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja (Budiman et al., 2025).

Priangan Timur, sebagai salah satu kawasan strategis di Jawa Barat, memiliki karakteristik tersendiri dalam struktur angkatan kerjanya yang terus

mengalami perubahan seiring dengan perkembangan ekonomi wilayah. Dominasi sektor-sektor tersebut turut memengaruhi dinamika penyerapan tenaga kerja dan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Adapun perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja di kabupaten/kota Priangan Timur dapat dilihat pada Gambar 1.4 di bawah ini.

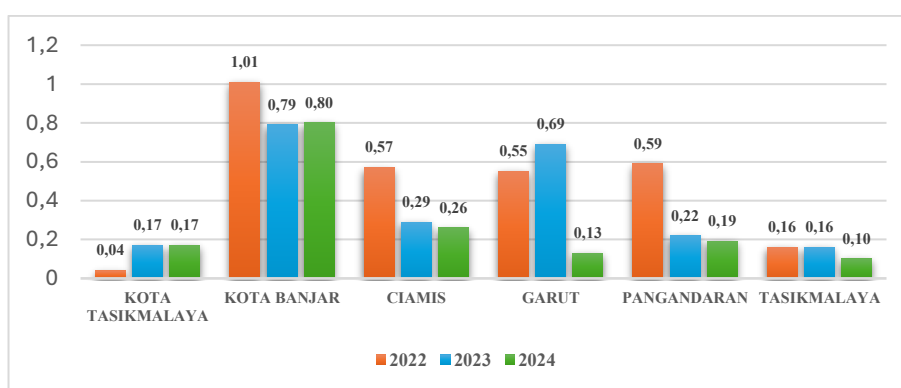


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah (2025)

Gambar 1.4 TPAK Priangan Timur Tahun 2022-2024 (Persen)

Berdasarkan Gambar 1.4, TPAK di wilayah Priangan Timur pada periode 2022-2024 menunjukkan tren peningkatan di seluruh daerah, meskipun dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda. Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Pangandaran secara konsisten berada pada posisi tertinggi, mencerminkan keterlibatan tenaga kerja yang kuat. Kabupaten Garut juga menunjukkan peningkatan stabil seiring meluasnya aktivitas ekonomi. Sementara itu, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kota Tasikmalaya mengalami kenaikan yang lebih moderat. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan penguatan partisipasi tenaga kerja dan dinamika ekonomi yang semakin positif di Priangan Timur. Fluktuasi tingkat partisipasi angkatan kerja ini mempengaruhi capaian IPM, terutama pada dimensi standar hidup layak dan akses terhadap layanan dasar.

Selain Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ada faktor lain yang juga dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu belanja bantuan sosial. Bantuan sosial merupakan salah satu komponen belanja pemerintah yang diklasifikasikan berdasarkan aspek ekonomi (Harsono et al., 2024). Apabila dikelola secara efektif, peningkatan belanja bantuan sosial berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat berpendapatan rendah, memperbaiki tingkat kesejahteraan, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan IPM di suatu daerah. Bantuan sosial tersebut direalisasikan melalui berbagai program pemerintah, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Simpanan Keluarga Sejahtera, serta Program Indonesia Sehat (A. A. R. Putri & Ribawati, 2025). Berikut grafik belanja bantuan sosial pemerintah daerah kab/kota di Priangan Timur dapat dilihat pada Gambar 1.5 di bawah ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah (2025)

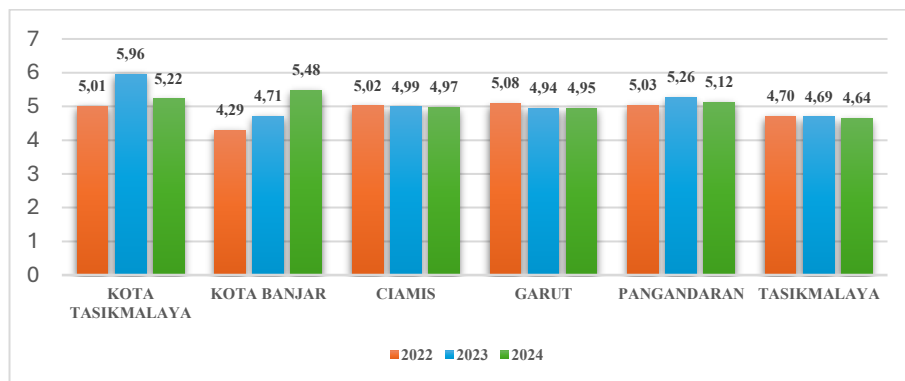
Gambar 1. 5 Distribusi Persentase Belanja Bantuan Sosial terhadap Total Belanja Daerah di Priangan Timur Tahun 2022-2024 (Persen)

Berdasarkan Gambar 1.5, terlihat bahwa alokasi bantuan sosial di wilayah Priangan Timur mengalami fluktuasi yang berbeda antar daerah. Kota Banjar tercatat sebagai daerah dengan persentase belanja bantuan sosial tertinggi, meskipun mengalami tren penurunan dari sekitar 1,01 persen pada tahun 2022 menjadi 0,79 persen pada tahun 2023 dan sedikit meningkat menjadi 0,80 persen pada 2024. Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan menurun hingga 2024. Kabupaten Garut mengalami kenaikan pada 2023, namun kembali menurun cukup tajam pada tahun 2024. Sementara itu, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya relatif memiliki persentase belanja bantuan sosial yang lebih rendah dibandingkan daerah lain, meskipun cenderung stabil. Perbedaan besaran alokasi tersebut mencerminkan variasi kapasitas fiskal daerah dalam menyediakan perlindungan sosial bagi masyarakat. Daerah dengan alokasi belanja bantuan sosial yang relatif rendah cenderung memiliki tingkat kerentanan ekonomi yang lebih tinggi, sehingga berisiko meningkatkan tekanan terhadap kondisi kemiskinan (A. A. R. Putri & Ribawati, 2025).

Tidak hanya PMDN, TPAK, dan belanja bantuan sosial yang dapat mempengaruhi capaian IPM, laju pertumbuhan ekonomi juga menjadi faktor penting karena mencerminkan kemampuan daerah dalam menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pembangunan manusia. Keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah tercermin dari meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan tersebut menunjukkan adanya peningkatan

produksi barang dan jasa oleh masyarakat, yang pada gilirannya memperluas aktivitas ekonomi dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Cahyanti et al., 2021).

Menurut Halawa & Manalu (2024), pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan suatu negara, karena mencerminkan peningkatan kapasitas *output* dari waktu ke waktu. Setiap daerah membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang memadai untuk mendorong perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, peningkatan pendapatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah umumnya diukur melalui besaran atau laju pertumbuhan PDRB yang menunjukkan kinerja perekonomian suatu wilayah secara komprehensif. Berikut grafik laju pertumbuhan ekonomi kab/kota di Priangan Timur dapat dilihat pada Gambar 1.6 di bawah ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah (2025)

Gambar 1. 6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Priangan Timur

Tahun 2022-2024 (Persen)

Berdasarkan Gambar 1.6, Laju Pertumbuhan Ekonomi Priangan Timur tahun 2022-2024, seluruh daerah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang relatif

stabil dengan variasi antar wilayah. Kota Tasikmalaya mengalami pertumbuhan tertinggi pada 2023 sebelum sedikit menurun pada 2024, sedangkan Kota Banjar menunjukkan peningkatan konsisten dari tahun ke tahun. Kabupaten Ciamis dan Garut mencatat pertumbuhan yang stabil dengan perubahan kecil setiap tahunnya. Kabupaten Pangandaran mengalami peningkatan pada 2023 diikuti penurunan ringan pada 2024, sementara Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan tren penurunan tipis selama periode tersebut. Secara umum, perekonomian Priangan Timur berada dalam kondisi stabil dengan beberapa daerah mengalami penguatan yang cukup signifikan.

Sumiyarti & Lazuardy (2023) menyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi berperan penting dalam meningkatkan IPM. Pertumbuhan ekonomi yang positif dapat menaikkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan kerja, serta memperbaiki akses pendidikan dan kesehatan, sehingga mendukung peningkatan kualitas hidup.

Rendahnya capaian IPM di wilayah Priangan Timur menjadi isu penting untuk dikaji karena berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat dan disparitas pembangunan antar wilayah. Pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi IPM menjadi krusial untuk mengidentifikasi sumber ketimpangan pembangunan dan menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, sehingga dapat menjadi dasar perumusan strategi pembangunan manusia yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan di Priangan Timur.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi IPM telah banyak dilakukan, namun hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan temuan yang

beragam dan sebagian besar dilakukan pada tingkat nasional maupun provinsi. Selain itu, kajian mengenai pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap IPM masih relatif terbatas, khususnya pada wilayah Priangan Timur. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh (Manopo et al., 2024), (Halawa & Manalu, 2024), (Septiani, 2022) dan (Tamara & Yeniwati, 2020) menunjukkan bahwa variabel PMDN, TPAK, belanja bantuan sosial dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap IPM baik ditingkat nasional maupun provinsi.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh keempat variabel tersebut terhadap IPM pada kabupaten/kota di wilayah Priangan Timur dengan menggunakan data periode 2020-2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih spesifik sesuai karakteristik wilayah Priangan Timur serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan manusia di daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diberi judul: **Pengaruh PMDN, TPAK, Belanja Bantuan Sosial dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Priangan Timur Tahun 2020-2024.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PMDN, TPAK, Belanja Bantuan Sosial dan LPE secara parsial terhadap IPM kabupaten/kota di Priangan Timur tahun 2020-2024?
2. Bagaimana pengaruh PMDN, TPAK, Belanja Bantuan Sosial dan LPE secara simultan terhadap IPM kabupaten/kota di Priangan Timur tahun 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh PMDN, TPAK, Belanja Bantuan Sosial dan LPE secara parsial terhadap IPM kabupaten/kota di Priangan Timur tahun 2020-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh PMDN, TPAK, Belanja Bantuan Sosial dan LPE secara simultan terhadap IPM kabupaten/kota di Priangan Timur tahun 2020-2024.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi dan kebijakan publik melalui analisis pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), belanja bantuan sosial, dan laju pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Priangan Timur. Dengan memasukkan variabel PMDN yang relatif masih terbatas dikaji dalam keterkaitannya dengan IPM, penelitian ini memberikan tambahan bukti empiris bahwa PMDN berpengaruh positif signifikan terhadap IPM di Priangan Timur. Penelitian ini diharapkan mampu memperluas khazanah literatur mengenai peran investasi domestik dalam mendorong kualitas pembangunan manusia di tingkat regional. Dari sisi kebijakan, temuan ini diharapkan dapat memberikan masukan yang relevan dan berbasis bukti empiris bagi pemerintah

daerah dalam merumuskan strategi pembangunan yang lebih efektif, inklusif, dan berorientasi pada pengurangan kesenjangan IPM antar wilayah di Priangan Timur.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi sarana pembelajaran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi pembangunan, serta sebagai penerapan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan ke dalam analisis empiris terkait pembangunan manusia di wilayah Priangan Timur.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang tepat guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya di wilayah Priangan Timur, serta sebagai pertimbangan dalam upaya pemerataan pembangunan di tingkat Provinsi Jawa Barat dan nasional.

3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kondisi dan kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia antar kabupaten/kota di wilayah Priangan Timur, sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dalam memperbaiki kualitas hidup.

